BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan salah satu fungsi vital dalam tata kelola pemerintahan, terutama terkait dengan penyediaan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Pengadaan barang/jasa dilakukan untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari yang sifatnya berulang secara terus menerus dan mempunyai pola kebutuhan pengadaan yang tetap, misalkan pembelian alat tulis kantor, atau kebutuhan lain untuk mendukung jasa pelayanan kepada masyarakat.[1] Proses pengadaan ini melibatkan banyak elemen dan tahapan yang kompleks, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pengadaan itu sendiri. Setiap tahapannya melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, yang semuanya harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan yang optimal, yakni penyediaan barang dan jasa yang efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam sistem pengadaan barang dan jasa, perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan prioritas dan urgensi dari tugas pemerintahan. Perencanaan yang tidak matang dapat menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam alokasi anggaran maupun pemenuhan kebutuhan yang tidak tepat sasaran. Hal ini

[1] Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2018, *Buku Informasi - 1 Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar*, LKPP, Jakarta, hlm.8

mengharuskan agar setiap elemen dalam proses ini perlu disusun dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Penganggaran juga merupakan elemen kunci dalam proses pengadaan barang dan jasa. Penganggaran yang tidak efektif dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan penggunaan dana publik, baik dalam bentuk pemborosan atau bahkan korupsi. Karena itu, setiap proses pengadaan harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan pengadaan barang dan jasa, dimana transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran harus dijaga dengan ketat. Kegagalan dalam tahap penganggaran dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan pengadaan yang dilakukan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran atau bahkan penyimpangan penggunaan dana publik[2]

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak lepas dari organisasi atau penyelenggara yang terlibat dalam proses pengadaan, penyelenggara pengadaan barang dan jasa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap tahapan pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Penyelenggara pengadaan barang dan jasa harus mematuhi prinsip-prinsip dasar pengadaan, seperti efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Prinsip ini juga menjadi pedoman dalam prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, apabila didapatkan pelanggaran terhadap prosedur ini tidak hanya dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pelaksanaan

[2] Sofyan Effendi & Aulia Utami Putri, 2022, Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa, Unsripress, Palembang, hlm 16.

pengadaan barang dan jasa selain melibatkan organisasi atau instantasi pemerintah selaku penyelenggara pengadaan barang dan jasa pengadaan barang dan jasa dalam prosedurnya juga melibatkan dua pihak utama, yaitu pihak pengguna dan penyedia barang/jasa tersebut. Pengguna adalah pihak yang membutuhkan barang atau jasa untuk kepentingan tugas pemerintahan, sedangkan penyedia adalah pihak yang menawarkan dan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan. Agar hakikat atau esensi dari pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yakni pihak pengguna dan pihak penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku. pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan lainnya.[3]

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya dalam hal ini pengadaan kendaraan dinas di Kota Yogyakarta, pemerintah daerah harus memastikan bahwa seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan kendaraan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang baik. Pengadaan kendaraaan dinas dalam Pemerintahan Kota Yogyakkarta sendiri diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Yogyakarta. Pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas dalam prosedurnya mencakup beberapa hal penting mulai dari

[3] Adrian Sutedi, 2016, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3

perencanaan anggaran, perencanaan kebutuhan, hingga pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak hanya berdiri sendiri sebagai penyelenggara pengadaan kendaraan dinas namun ada beberapa tahap yang mana nantinnya dalam tahap tersebut terdapat peran dari DPRD Kota Yogyakarta dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan kendaraan dinas untuk kepentingan tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kendaraan dinas berperan penting dalam menunjang mobilitas, efektivitas, dan efisiensi pegawai negeri dalam menjalankan tanggung jawab mereka, baik yang bersifat administratif, pelayanan publik, maupun kegiatan pengawasan di lapangan. Seiring dengan pentingnya kendaraan dinas dalam menunjang pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil di Pemerintahan Kota Yogyakarta, pengadaan kendaraan dinas menjadi instrumen penting yang mana berperan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) bagi Pemerintah Kota Yogyakarta. *Good governance* menjadi prinsip yang harus dipegang dalam proses pengadaan kendaraan dinas, Hal ini sangat relevan dalam pengadaan kendaraan dinas yang mana keterbukaan dalam proses pengadaan kendaraan dinas yang mana para pihak yang terlibat bisa mengetahui bagaimana proses pengadaan dari awal perencanaan pengadaan hingga pelaksanaan pengadaan kendaraan dengan transparan. Dalam rangka mencapai tujuan pengadaan yang

baik, diperlukan adanya manajemen pengadaan yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip *good governance.*[4]

Regulasi pengadaan barang dan jasa, diatur secara komprehensif melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengaturan Kendaraan dinas di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengang serah terima hasil pekerjaan.[5] Peraturan ini menegaskan bahwa proses pengadaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Prinsip-prinsip ini bertujuan agar pelaksanaan pengadaan barang dan

[4] *Bappeda Kabupaten Jombang,* Kajian Efektivitas Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Sistem Sewa, hlm 1, https://bappeda.jombangkab.go.id/berita/kajian-efektifitas-pengadaan-kendaraan-dinas-operasional-sistem-sewa-10392, diakses 6 Desember 2024.
[5] Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

jasa pemerintah dapat berjalan dengan baik dengan melihat prosedur pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai prosedur dan harus melihat prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa agar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak terjadi penyimpangan atau hambatan dalam pelaksanaannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, mengatur terkait dengan pengertian Kendaraan Dinas yakni kendaraan dinas adalah Kendaraan Milik Pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan[6]. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas memberikan pengertian terkait kendaraan dinas yakni, Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.

[6] Pasal 1 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

Pengadaan kendaraan dinas dalam Pemerintahan Kota Yogyakarta juga harus memenuhi standar tersebut, yang dimulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan kendaraan yang sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta, hingga proses pengadaan kendaraan dinas dan serah terima kendaraan dinas serta pemanfaatan kendaraan dinas. Proses tersebut dimulai dari perencanaan kebutuhan, yang mencakup identifikasi kebutuhan kendaraan dinas berdasarkan tugas dan tanggung jawab PNS. Pemilihan kendaraan yang sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan operasional merupakan tahap krusial untuk memastikan bahwa kendaraan yang dipilih benar-benar mampu mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas yang mana dilakukan melalui proses pengadaan kendaraan dinas melalui elekronik atau *e-procurement* melalui website pengadaan yang sudah dibuat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah. *E-Procurement* juga memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman karena proses pengadaan mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronikdengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang dan jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka.[7]

Pengadaan kendaraan dinas yang tepat sasaran merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran tugas dan meningkatkan kinerja pegawai negeri di berbagai sektor pemerintahan. Kendaraan dinas yang digunakan oleh pegawai pemerintah tidak hanya harus memenuhi kebutuhan fungsional, seperti transportasi dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan, tetapi juga harus

[7] K. Udoyono, "*E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta", *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol 3, No 1 (2012): February 2012 hlm. 3.

disesuaikan dengan kondisi geografis, lingkungan kerja, serta karakteristik spesifik dari masing-masing bidang pekerjaan. Sebagai contoh bagi pegawai yang bertugas di bidang pengawasan atau operasional lapangan, kendaraan dinas yang disediakan harus memiliki ketangguhan, keunggulan, serta kemampuan mobilitas yang baik dalam menghadapi berbagai kondisi medan, baik di perkotaan maupun di area yang sulit dijangkau.

Pengadaan kendaraan dinas yang tidak tepat sasaran dapat berdampak negatif terhadap berbagai aspek operasional pemerintahan. Hal ini bisa mengakibatkan penurunan efisiensi kerja, hambatan dalam pelaksanaan tugas, serta meningkatnya biaya operasional dan perawatan kendaraan. Solusi dalam menghindari masalah ini antara lain perencanaan dan pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas harus dilakukan dengan cermat, memperhatikan kebutuhan pegawai, serta spesifikasi kendaraan yang sesuai dengan karakteristik tugas yang diemban. Pemilihan kendaraan yang tepat sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, baik di lapangan maupun di kantor.

Pengadaan kendaraan dinas memiliki peran strategis tidak hanya dalam mendukung kinerja pegawai negeri sipil (PNS), tetapi juga harus sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran dan akuntabilitas penggunaan aset negara. Dengan pengadaan yang tepat dan terencana, pemerintah dapat memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan optimal, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara. Ini bertujuan agar kendaraan dinas yang disediakan benar-

benar mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan memberikan manfaat maksimal bagi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengadaan kendaraan dinas sering kali menghadapi berbagai kendala, Salah satu kendala yang sering muncul adalah keterbatasan anggaran atau pengalokasian anggaran terhadap hal mendesak. Meskipun pemerintah berusaha mengalokasikan dana untuk pengadaan kendaraan dinas, sering kali kebutuhan yang diajukan oleh instansi tidak dapat terpenuhi secara optimal akibat keterbatasan alokasi anggaran. Diperkirakan sekitar 40% dari total anggaran pemerintah dihabiskan untuk proses pengadaan barang/jasa pemerintah, karena pengadaan barang dan jasa mempunyai proporsi nilai yang begitu besar, maka proses pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai dampak yang signifikan terhadap belanja pemerintah dan kinerja program kerja pemerintah[8].

Penelitian mengenai pengadaan kendaraan dinas untuk mendukung kepentingan tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Yogyakarta bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana proses pengadaan ini dilaksanakan, kendala apa saja yang dihadapi, serta bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat dalam perbaikan proses pengadaan di masa depan, baik dari segi perencanaan, implementasi, maupun pengawasan.

[8] Muhammad Ulil Albab, 2017, "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)", Jurnal Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, VolV/No-4/April/2017, Universitas Gadjah Mada, hlm 2.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan memberi kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas pengadaan kendaraan dinas, sehingga dapat mendukung kinerja pegawai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas untuk kepentingan tugas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas untuk kepentingan tugas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas untuk kepentingan tugas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengadaan kendaraan dinas untuk kepentingan tugas pegawai negeri sipil Pemerintah Kota

Yogyakarta Di Kota Yogyakarta, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas untuk kepentingan tugas pegawai negeri sipil Pemerintah Kota Yogyakarta Di Kota Yogyakarta, baik dari aspek administratif, regulasi, maupun teknis.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan kendaraan dinas di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi perkembangan Ilmu hukum pada khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa sehingga dapat menghasilkan terobosan baru dalam rangka pengembangan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

   Bagi pelaku pengadaan barang dan jasa, penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan pengetahuan bagi para pihak sehingga dapat memahami aspek hukum pengadaan barang dan jasa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Pengadaan Kendaraan Dinas Untuk Kepentingan Tugas Pegawai Negeri Sipil Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Di Kota Yogyakarta" merupakan karya asli dan bukan plagiasi. Sebagai pembanding atas penelitian ini ada 3 (tiga) buah skripsi, yaitu:

a. Florentinus Valeri Warang[9]

Judul Penelitian:

Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Yang Baik

Perguruan Tinggi:

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah :

Rumusan masalah dari Penulisan tersebut adalah terkait dengan Bagaimana pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta? Serta kendala-kendala pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahn daerah DIY dan Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta?

---

[9] Florentinus Valeri Warang, Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang Baik, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hasil Penelitian:

1. Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah DIY terdiri atas penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), penandatanganan kontrak, pemberian uang muka, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak, pemutusan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan. Pelaksanaan kontrak pengadaan ini telah berjalan dengan baik. Adapun indikator berjalan baik ini karena telah memenuhi prinsip pengadaan barang/jasa dan etika pengadaan sebagaimana yang telah diatur pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 09 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan barang /jasa melalui penyedia.
2. Terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa Pemda DIY. Adapun kendalanya yaitu pemborong yang bermain curang dengan menukar barang diluar spesifikasi, penyedia menawar terlalu rendah dari harga HPS yang dilelang melalui aplikasi SIRUP, dan keadaan kontrak kritis.
3. Terhadap kendala-kendala tersebut terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui PPK atau pejabat pengadaan yanga da di setiap OPD dengan cara memperkuat dokumen-dokumen perencanaan pengadaan, memperketat pengawasan pekerjaan pengadaan, meminta garansi seperti jaminan di bank, asuransi dan jaminan lainnya, dan melakukan pengendalian kontrak Bening Warastri

dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis dengan judul 'Pengadaan Barang Dan Jasa Perawatan Jalan Umum Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Di Kota Yogyakarta'' Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah untuk:

a. Pengadaan Barang Dan Jasa Perawatan Jalan Umum Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Di Kota Yogyakarta
b. Kendala-kendala Dari Pengadaan Barang Dan Jasa Perawatan Jalan Umum Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Di Kota Yogyakarta; dan
c. Cara Mengatasi Kendala-kendala Dari Pengadaan Barang dan Jasa Perawatan Jalan Umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Di Kota Yogyakarta.

Letak Perbedaan:

Skripsi penulis berfokus secara spesifik pada pengadaan kendaraan dinas untuk PNS, sedangkan skripsi yang ditulis oleh Florentinus Valeri Warang lebih luas yakni mencakup pengadaan barang/jasa secara umum di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Perbedaan Pertama bahwasannya Skripsi penulis berfokus pada satu jenis pengadaan, yaitu kendaraan dinas dan skripsi Florentinus Valeri Warang bertujuan untuk menganalisis kualitas pengadaan barang/jasa secara umum di tingkat pemerintahan DIY. Secara keseluruhan, perbedaan utama adalah bahwa skripsi penulis fokus pada pengadaan kendaraan dinas dengan lingkup terbatas pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan skripsi Florentinus Valeri Warang membahas pengadaan

barang/jasa secara umum dan pelaksanaan kontraknya di Pemerintah Daerah DIY.

2. **Bening Warastri**[10]

Judul Penelitian:

Pengadaan Barang Dan Jasa Perawatan Jalan Umum Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Di Kota Yogyakarta

Perguruan Tinggi:

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah:

Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah terkait dengan bagaimana pengadaan barang dan jasa perawatan jalan umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta, serta apa kendala-kendala dari pengadaan barang dan jasa perawatan jalan umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta dan bagaimana cara mengatasi kendala dari pengadaan barang dan jasa perawatan jalan umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta.

Hasil Penelitan:

1. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yakni melibatkan peran dari Bagian Pengadaan Barang

[10] Bening Warastri, Pengadaan Barang dan Jasa Perawatan Jalan Umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

dan Jasa (UKPBJ) dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP). Mereka melakukan pengadaan sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadan Barang dan Jasa Pemerintah seperti yang tertera pada Pasal 3 ayat (3), yakni melalui swakelola. Terkait dengan wilayah yang menjadi ranah Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa perawatan jalan umum diatur dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Kota Yogyakarta. Personel swakelola berasal dari masyarakat yang direkrut oleh pemerintah melalui pembukaan lowongan pekerjaan di publik melalui media sosial. Personel swakelola dibagi perannya menjadi 4 (empat), yakni mandor, tukang, pekerja, dan sopir. Proses pengadaan barang/jasa perawatan jalan umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta di Yogyakarta diawali dengan survei jalan dan penerimaan laporan kerusakan jalan dari instansi pemerintah lainnya serta aplikasi Jogja 59 Smart Service (JSS). Adanya perencanaan yang matang, strategis, dan efektif serta efisien dalam setiap pengadaan barang/jasa perawatan jalan umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta. Pengadaan ini berdampak besar terhadap kualitas infrastruktur jalan umum serta kesejahteraan pengguna jalan umum.

2. Terdapat banyak kendala yang kerap dialami selama pengadaan barang/jasa perawatan jalan umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta. Kendala dapat berasal dari internal maupun eksternal.

Kendala yang paling utama yakni pada faktor waktu pelaksanaan yang harus selalu dilakukan pada malam dan/atau dini hari. Adapun kendala lainnya seperti armada rusak, alat-alat rusak, dan cuaca ekstrim. Sumber daya manusia dan tenaga kerja yang tidak terampil dan ahli dalam pekerjaan juga menjadi sebuah hambatan yang cukup krusial bagi pengadaan ini. Beberapa permasalahan dengan masyarakat pun memunculkan kendala bagi pengadaan barang/jasa perawatan jalan umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta. Kendala dari lingkungan sosial masyarakat, seperti mobilitas masyarakat yang tinggi serta padatnya lalu lintas masyarakat di jalan umum yang sedang diperbaiki. Masalah teknis dan material menjadi kendala lainnya yang cukup sulit untuk dihindari. Hal ini terjadi ketika material yang tersedia tidak sesuai dengan standar juga ketika pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah diatur sebelumnya. Beberapa kali pula 60 terjadi kendala ketika pelaksanaan tidak sesuai teknis dikarenakan adanya ketidaksesuaian dalam perencanaan teknis dan pelaksanaannya.`

3. Selama proses perawatan jalan umum yang memiliki banyak kendala tersebut, tentunya harus diperhatikan mengenai upaya mengatasinya. Upaya-upaya tentu diusahakan dan dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta demi mengatasi kendala-kendala yang muncul selama pengerjaan perawatan jalan umum Kota Yogyakarta. Langkah-langkah upaya tersebut melibatkan pemantauan cuaca yang rutin dan cermat, koordinasi dengan pihak masyarakat dan pejabat berwenang setempat,

dan membuat strategi pelaksanaan pengerjaan yang dapat dicicil sewaktu pagi dan siang yang aman. Terkait dengan kendala sumber daya manusia maka dilakukan penyaringan yang lebih ketat dan mendalam saat proses rekrutmen personel swakelola. Kemudian untuk kendala material, maka diupayakan untuk mencari material yang sesuai standar secepat mungkin. Lalu tetap dilakukan upaya untuk melakukan segala hal teknis sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah diatur. Walaupun terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, tetaplah memerhatikan strategi yang tepat serta kerja sama yang solid antar semua pihak yang bersangkutan, juga dengan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya perawatan jalan umum Kota Yogyakarta dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif, mendukung keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan infrastruktur vital, yakni jalan umum di Kota Yogyakarta.

Letak Perbedaan :

Skripsi penulis berfokus pada pengadaan kendaraan dinas untuk PNS, sementara skripis yang ditulis oleh Bening Warastri meneliti pengadaan barang dan jasa untuk perawatan jalan umum. Perbedaan pertama antara skripsi penulis dan skripsi Bening adalah Objek pengadaannya, yaitu kendaraan dinas dan perawatan infrastruktur jalan. Kedua skripsi penulis lebih fokus pada proses pengadaan kendaraan dinas di Pemerintahan Kota Yogyakarta, sedangkan skripsi Bening Warastri membahas pengadaan jasa perawatan jalan yang melibatkan pekerjaan fisik. Kemudian perbedaan

ketiga yakni skripsi penulis bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengadaan kendaraan dinas, sementara skripsi Bening Warastri ingin meningkatkan efisiensi perawatan jalan umum. Secara keseluruhan, perbedaan utama adalah pada jenis pengadaan yaitu penulis membahas terkait dengan pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan kendaraan dinas mulai dari proses dan hambatan dalam pengadaan kendaraan dinas, sedangkan skripsi Bening Warastri membahas terkait dengan pengadaan barang dan jasa untuk perawatan jalan umum dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tersebut.

3. **Yohanes Baptista Adrian Bahi**[11]

Judul Penelitian:

Penerapan Prinsip Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Melalui Cara *E-Purchasing* Di Pemerintah Kota Yogyakarta

Perguruan Tinggi:

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah:

Bagaimana penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta, Kemudian Apa saja kendala-kendala Penerapan Prinsip

[11] Yohanes Baptista Adrian Bahi, Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa Melalui Cara E-Purchasing di Pemerintah Kota Yogyakarta, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta dan Bagaimana Upaya dalam mengatasi kendala-kendala Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Hasil Penelitian:

1. Bahwa dalam pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik (*e-purchasing*) di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan dengan Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa seperti yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa melalui cara *e-purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu kendala kesulitan terkait informasi update dari pusat, sehingga penyedia mengalami kesusahan karena cara mendaftarkan produknya berubah dari cara yang sebelumnya. Kendala selanjutnya adalah pada penyedia dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), yang dimana penyedia yang masih kurang aktif untuk membaca dan mempelajari dahulu tersendiri mengenai cara untuk mendaftarkan produknya pada sistem *E-Purchasing*, sehingga penyedia sangat ketergantungan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan datang ke kantor tanpa mempelajari terlebih dahulu. Begitu pun juga dengan OPD mereka

masih bingung tentang bagaimana cara transaksi menggunakan *E-Purchasing.* Kendala selanjutnya adalah mengenai ketersediaan produk yang diminati atau dibutuhkan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) itu terkadang masih belum ada di *E-purchasing*, sehingga perlu melakukan survey terlebih dahulu kepada penyedia untuk harus aktif memasukan produknya sesuai dengan yang ada di aplikasi.

3. Upaya yang dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara sistem *E-Purchasing* dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan membuka konsultasi gratis kepada penyedia barang/jasa maupun OPD yang mengalami permasalahan atau kendala yaitu dapat langsung menghubungi ke *helpdesk* dari bagian pengadaan barang atau jasa, lalu terkadang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta didatangkan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk menjadi narasumber dalam hal ini memberikan solusi/advice terkait permasalahan yang dialami OPD pada saat mengakses sistem *E-Purchasing*. Kemudian upaya selanjutnya adalah terkait kesulitan informasi updating dari pusat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan upaya dengan informasi updating dari pusat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan upaya dengan mengkoordinasikan masalah updating sistem *E-Purchasing* ini kepada LKPP RI yang berada di Jakarta melalui via Zoom maupun surat menyurat.

Letak Perbedaan:

Perbedaan pertama yakni skripsi penulis berfokus pada pengadaan kendaraan dinas untuk PNS, sementara skripsi Yohanes Baptista Adrian Bahi berfokus pada penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa melalui metode *e-purchasing*. Perbedaan kedua yakni skripsi penulis bertujuan meningkatkan efektivitas pengadaan kendaraan dinas dan hambatan pengadaan dalam pelaksanaan, sementara skripsi Yohanes Baptista Adrian Bahi bertujuan meningkatkan penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan berbasis elektronik (*e-purchasing*). Perbedaan Ketiga yakni Kendala di skripsi penulis lebih terkait dengan pengadaan kendaraan kendaraan dinas, sementara skripsi Yohanes Baptista Adrian Bahi meneliti kendala yang lebih teknis dalam penggunaan sistem *e-purchasing* Secara keseluruhan, perbedaan utama adalah pada metode pengadaan yang diteliti yang mana skripsi penulis meneliti terkait dengan pengadaan kendaraan dinas dan skripsi Yohanes Baptista Adrian Bahi membahas terkait pengadaan elektronik melalui *e-purchasing* dan aspek yang dibahas terkait dengan proses pengadaan kendaraan dinas, sedangkan Yohanes terkait dengan efektivitas dan efisiensi dalam sistem *e-purchasing*.

F. Batasan Konsep

1. Pengadaan Kendaraan Dinas

Proses pembelian atau penyewaan kendaraan oleh instansi pemerintah untuk digunakan oleh pejabat publik. Pengadaan ini mencakup semua tahap

mulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan vendor, hingga serah terima kendaraan.

2. Kendala Pengadaan

   Faktor-faktor yang menghambat atau mempersulit proses pengadaan kendaraan dinas, termasuk kendala administratif, teknis, dan regulasi. Hal ini dapat mencakup kesulitan dalam perencanaan, ketidaksesuaian spesifikasi kendaraan, serta masalah dalam pelaksanaan pengadaan yang menyebabkan keterlambatan atau pembengkakan anggaran.

3. Efektivitas Pengadaan

   Tingkat keberhasilan pengadaan kendaraan dinas dalam memenuhi kebutuhan operasional Pegawai Negeri Sipil secara efisien dan efektif, serta dampaknya terhadap kinerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Regulasi Pengadaan Barang/Jasa

   Aturan hukum yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan-peraturan terkait lainnya yang memberikan pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan pengadaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas di Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, atau bahan hukum tertulis lainnya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga data primer dari peneltiain ini adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007.

5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola tipe Swakelola
6) Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
7) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Lembaran Daerah Kota

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Penjelasan peraturan perundang-undangan terkait dengan bahan hukum primer.
2) Buku, jurnal, serta literatur terkait dengan bahan hukum primer.
3) Narasumber yang berwawasan mengenai pengadaan barang dan jasa kendaraan dinas di Kota Yogyakarta yakni Bapak Nurrokhman, S.E,Ak salah satu pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer yang telah disebutkan, yaitu peraturan perundang-undangan, syarat pengadaan barang dan jasa, serta tahapan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber terkait, yakni Bapak Nurrokhman, S.E,Ak salah satu pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Data primer yang terkumpul, yakni peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang ada dan berlaku, diinterpertasikan secara berurutan. Kemudian data sekunder yang diperoleh, yakni dari penjelasan peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait, literatur, serta hasil wawancara dengan narasumber juga akan diinterpretasikan. Kedua perolehan data ini dihubungkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan agar dapat mendapatkan sebuah kesimpulan dari analisis data tersebut.